

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

BELANJA PUBLIK DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DI SULAWESI BARAT

¹Achmad Ervan Paturusi, ²Abdul Hamid Paddu

¹Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin

e-mail : ¹achm4dpaturusi@gmail.com, ²hamidpaddu@yahoo.com

Abstrak

Belanja modal yang merupakan bagian dari belanja publik pemerintah, dengan Teori Produksi Cobb-Douglas dapat dipandang sebagai salah satu input bagi produksi pertanian yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal terkait produksi pertanian; yaitu belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja peralatan dan mesin terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Selanjutnya data dianalisis dengan metode analisis *two stage least square* (2SLS) yang diolah dengan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS v.20). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua belanja tersebut tidak memiliki hubungan yang nyata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Selanjutnya, kedua jenis belanja modal tersebut juga tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian melalui produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Barat.

Kata Kunci: Belanja Modal, Teori Produksi Cobb-Douglas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian, Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian.

The Public Expenditure And The Absorption Of Manpower In Agriculture Sector In West Sulawesi

Abstract

Capital expenditures that are part of publik spending, through Cobb-Douglas Production Theory can be viewed as one of inputs to Agricultural Production that is measured by the Gross Regional Domestik Product (GRDP) of the Agricultural Sector in West Sulawesi Province. Therefore research is aimed to test the effect of capital expenditure related to the agricultural production, i.e the expenditure for the road, irrigation and network as well as the expenditure for instruments and machines on Gross Regional Domestik Product (GRDP) in Agricultural Sector and its impact on the absorption of manpower in agricultural sector. The research used quantitative approach by using the secondary data of five regencies in West Sulawesi Province. The data were obtained from the library studies. The data were then analyzed using two stage least square (2SLS), and then were processed using the software of *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS v.20). The research result indicated that both expenditures had no significant correlation on Gross Regional Domestik Product (GRDP) in Agricultural Sector. Moreover, both types of capital expenditure also did not have any impact on the absorption of manpower in agricultural sector through Gross Regional Domestik Product (GRDP) of Agricultural Sector in West Sulawesi Province.

Keywords: Capital Expenditure, Production Theory of Cobb-Douglas, Gross Regional Domestik Product (GRDP) of Agricultural Sector, Absorption of Manpower in Agricultural Sector.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

A. PENDAHULUAN

Pertanian masih menjadi mesin penggerak roda ekonomi (*economic engine*) Provinsi Sulawesi Barat Hal tersebut dapat dilihat pada salah satu dari empat strong point pembangunannya yaitu "Revitalisasi Pertanian" Disamping perkembangan salah satu indikatornya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian. Meskipun ada kecenderungan menurun, sektor pertanian masih mendominasi dan menjadi prioritas dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan di Provinsi *Malaqbi*, Sulawesi Barat.

Demikian juga dengan fakta bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Sulbar. Tidak kurang dari 300 ribu tenaga kerja atau lebih dari setengah tenaga kerja Sulawesi Barat (BPS, 2015)) menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Sejak menjadi pemerintah yang otonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah mendapatkan kewenangan yang terdesentralisasi pada bidang fiskal dan administrasi. Seperti yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sehingga telah memberikan kebebasan kepada Pemprov. Sulbar dalam merencanakan, mengalokasikan anggaran dan mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian.

Kembali pada filosofi dasar dari desentralisasi fiskal yang sedianya dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja pengeluaran daerah sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi yang telah dinikmati melalui otonomi daerah oleh Provinsi Sulawesi Barat seharusnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian.

Pemerintah kabupaten di Provinsi Sulbar sejauh ini sejak otonomi daerah, telah mengalokasikan belanja modal sebagai bagian dari belanja publik. Terdapat kecenderungan yang terus meningkat walaupun ada fluktuasi pada tahun tertentu. Namun demikian, jika dibandingkan dengan perkembangan porsi Produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian dan selanjutnya terhadap porsi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, maka terdapat kesenjangan ataupun ketidak-

konsistenan antara kecenderungan kenaikan belanja modal pemerintah kabupaten di Provinsi Sulbar dengan kecenderungan penurunan porsi PDRB sektor pertanian dan porsi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Sejauh ini beberapa peneliti telah berupaya untuk melihat hubungan kewenangan belanja pemerintah pada desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Lebih khusus lagi, ada yang ingin melihat hubungannya dengan pertumbuhan sektor pertanian. Serta lebih jauh lagi, hubungan pertumbuhan sektor pertanian dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian.

Namun demikian penelitian-penelitian tersebut hanya melihat secara umum hubungan desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, bukan terhadap komposisi belanja apalagi spesifik terhadap belanja modal. Komposisi belanja pemerintah sebagai salah satu penyebab mengapa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Davoodi & Zou, 1998). Sebab Desentralisasi fiskal tidak memberikan informasi yang lebih jauh tentang belanja pemerintah. Sehingga tidak bisa dibedakan antara belanja rutin dengan belanja modal, antara pengeluaran untuk kesejahteraan dan jaminan sosial dengan belanja infrastruktur.

Oleh karena itu sangat penting untuk mempertimbangkan belanja modal sebagai bagian dari komposisi pengeluaran pemerintah daerah untuk barang publik untuk diteliti lebih jauh. Bukan hanya hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi tapi juga dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja, sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang belanja modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja menunjukkan hasil yang berbeda baik itu tidak signifikan, signifikan positif maupun signifikan negatif. Selanjutnya, dalam konteks belanja publik sebagai salah satu fokus studi dalam akuntansi sektor publik, maka masih terdapat celah yang belum terungkap dan diteliti. Seperti belanja modal yang lebih terperinci (elemen) dalam bentuk belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja peralatan dan mesin. Kedua jenis belanja modal yang dapat diasumsikan berdasarkan teori Produksi *Cobb-Douglas* yang dijelaskan melalui model *Barro*, sebagai faktor produksi yang akan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

mempengaruhi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian dan berdampak lebih lanjut terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian.

Oleh karena itu penelitian ini mencoba menawarkan sebuah pendekatan yang ingin melihat pengaruh langsung antara belanja modal dalam dimensi belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja peralatan dan mesin terhadap PDRB sektor pertanian. Selanjutnya, penelitian ini lebih jauh lagi ingin melihat dampak belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja peralatan dan mesin terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian melalui PDRB sektor pertanian..

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tidak terdapat hubungan linear (tabel 1) antara variabel independen belanja jalan, irigasi dan jaringan (X1) terhadap variabel dependen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian (Y1).

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif antara dana konsentrasi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian (Sumedi dkk., 2013). Lebih khusus hasil penelitian yang menunjukkan hubungan signifikan positif antara infrastruktur jalan dengan porsi produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian (Anwar dkk., 2016). Hasil penelitian juga tidak dapat menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian yang membuktikan bahwa belanja modal secara signifikan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Alam, 2016).

Namun demikian penelitian ini menjelaskan lebih lanjut temuan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi (Xie et al., 1999; Hendarmin, 2012; Anasmen, 2009).

Temuan tersebut bertentangan dengan teori model pembangunan Rostow dan Musgrave tentang tahapan pengeluaran terkait pembangunan ekonomi. Sementara itu belanja modal merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan belanja publik, sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pembangunan daerah.

Disamping itu, penelitian ini juga bertentangan dengan teori Produksi *Cobb-Douglas* yang dijelaskan melalui model *Barro* bahwa modal swasta dan belanja publik merupakan dua input bagi fungsi Produksi.

Alokasi dan komposisi pada belanja jalan, irigasi dan jaringan yang mungkin menyebabkan hubungan tidak nyata terhadap PDRB sektor pertanian. Proporsi alokasi dan komposisi elemen-elemen belanja jalan, irigasi dan jaringan kemungkinan tidak terkait langsung dengan produksi pertanian pada lima kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Hasil penelitian juga menunjukkan hubungan tidak nyata atau tidak signifikan antara variabel belanja peralatan dan mesin dengan tingkat Produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian (tabel 1). Hasil penelitian ini tidak mendukung beberapa penelitian sebelumnya, yang membuktikan hubungan negatif antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi (Alam, 2016). Namun demikian penelitian ini sejalan dan dapat menjelaskan lebih lanjut temuan, yang membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi (Xie et al., 1999; Hendarmin, 2012; Anasmen, 2009). Disamping itu, terkait dengan PDRB sektor pertanian sebagai variabel dependen, hasil tersebut juga tidak sejalan dengan penelitian yang membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan dan positif antara Dana dekonsentrasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sektor Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian (Sumedi dkk., 2013).

Belanja peralatan dan mesin juga tidak dapat menjelaskan lebih lanjut apakah belanja tersebut terkait langsung atau berkontribusi terhadap PDRB sektor pertanian. Hal tersebut kemungkinan disebabkan oleh alokasi dan komposisi belanja peralatan dan mesin yang tidak memiliki kontribusi langsung terhadap produksi pertanian

Namun demikian hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan linear (signifikan) antara variabel independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertanian terhadap variabel dependen penyerapan tenaga kerja sektor pertanian (tabel 1).

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

Tabel 1 Hasil Uji T Pada Model Two Stage Least Square (2SLS)

Variabel	Koefisien	t	Sig	Kesimpulan
belanja jalan, irigasi dan bendungan (X1) terhadap PDRB sektor pertanian	0.271	1.599	0,120	Tidak signifikan
realisasi belanja peralatan dan mesin (X2) terhadap PDRB sektor pertanian	0.038	0,219	0,828	Tidak signifikan
produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian (Y1) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian	1.684	2.371	0.024	signifikan

Sumber: Hasil Olah Data dengan SPSS 20.0, 2017

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang menemukan hubungan signifikan dan positif antara pertumbuhan ekonomi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja (Yasrizal & Hasan, 2016), disamping penelitian yang memperoleh hasil hubungan yang signifikan dan positif antara porsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor primer (pertanian dan pertambangan) dengan penyerapan tenaga kerja (Anwar dkk., 2016).

Temuan ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mampu menyerap tenaga sektor pertanian dengan porsi yang masih dominan. Walaupun kecenderungannya terus menurun.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan tidak langsung antara belanja jalan, irigasi dan jaringan terhadap penyerapan tenaga sektor pertanian melalui produk domestik regional bruto (PDRB) sektor Pertanian, tidak signifikan (tabel 1).

Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang menemukan hubungan yang signifikan dan positif antara infrastruktur jalan terhadap penyerapan tenaga kerja melalui porsi PDRB sektor primer (Anwar dkk., 2016).

Hasil tersebut mengungkapkan bahwa jalan, irigasi dan jaringan tidak memiliki dampak yang nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Belanja tersebut belum efektif terhadap sasaran (*outcome*) penyerapan tenaga kerja, jika dilihat dari prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2009). Belanja tersebut tidak memiliki hubungan nyata terhadap *output* apalagi terhadap *outcome*. Hal tersebut terjadi karena variabel belanja jalan, irigasi dan jaringan tidak dapat menjelaskan

lebih lanjut apakah memang belanja tersebut terkait langsung atau berkontribusi terhadap PDRB sektor pertanian. Hal ini terjadi karena kemungkinan alokasi dan komposisi belanja tidak berkontribusi langsung terhadap PDRB sektor pertanian. Sehingga tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerjasektor pertanian.

Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara belanja peralatan dan mesin terhadap penyerapan tenaga sektor pertanian melalui produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian, juga tidak signifikan (tabel 1).

Belanja peralatan dan mesin belum memiliki dampak yang nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Belanja tersebut belum efektif terhadap sasaran penyerapan tenaga kerja. Belanja tersebut tidak memiliki hubungan nyata terhadap PDRB Sektor Pertanian (output) apalagi berdampak terhadap penyerapan tenaga sektor pertanian (outcome). Hal tersebut mungkin disebabkan alokasi dan komposisi belanja peralatan dan mesin yang tidak berkontribusi langsung terhadap PDRB sektor pertanian. Kemudian tidak berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian..

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan penelitian ini adalah belanja jalan, irigasi dan jaringan tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian. Belanja peralatan dan mesin tidak berpengaruh terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian. Produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Belanja jalan, irigasi dan jaringan tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian melalui produk domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian. Belanja peralatan dan mesin tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian melalui produk domestik regional bruto (PDRB) sector pertanian. Periode data dan wilayah objek studi sebaiknya di-*upscale* bagi penelitian selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang belanja modal terkait produksi domestik regional bruto (PDRB) sektor pertanian dan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI

dampaknya terhadap penyerapan tenaga sektor pertanian.

REFERENSI

- Alam, N. 2016. *Analisis Flypaper Effect dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal serta Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi*, Tesis. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000-2006*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Anwar, Sy., Zain, M. Y., Fattah, S., & Padu, A. H. 2016. *Determinants and Effects of Structural Economic Change on Employment and Income Inequality in East Kalimantan*. *International Journal of Education and Research*, Vol 4 (2), p 179 - 196.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. 2015. *Keadaan Angkatan Kerja Di Sulawesi Barat Agustus 2014*. Mamuju: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat
- Davoodi, H. & Zou H. 1998. *Fiskal Decentralization and Economic Growth: A Cross-Country Study*. *Journal of Urban Economics*, Vol 45, p 228-239.
- Economics, Vol 43, p 244- 257.
- Hendarmin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat*. *Jurnal Eksos*, Vol 8 (3), p 144 -155.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sumedi, Simatupang, P., Sinaga, B. M., & Firdaus, M. 2013. *Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah*. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol 31 (2), p 97-113.
- Yasrizal & Hasan, I. 2016. *Pengaruh Pembangunan Sektor Pertanian Terhadap Distribusi Pendapatan dan Kesempatan Kerja di Indonesia*. *JIEP*, Vol 18 (1).
- Xie, D., Zou H., & Davoodi H.. 1999. *Fiskal Decentralization and Economic Growth in the United State*. *Journal of Urban Eco*